Peran Bank Jateng Dalam Implementasi Program Kredit Ketahanan Pangan Dan Energi (KKP-E)

JURNAL ILMIAH

Disusun Oleh:

CHEVIENE CHARISMA PUTRIE

NIM. 115020200111003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2015

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan MT Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Telp. (0341) 551396, 555000, Fax. (0341) 553834
E-mail : feb@ub.ac.id http://www.feb.ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL (Skripsi)

Artikel Jurnal dengan judul :

PERAN BANK JATENG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KREDIT KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI (KKP-E)

Yang disusun oleh :

Nama : CHEVIENE CHARISMA PUTRIE

NIM : 115020200111003

Jurusan : Manajemen

Fakultas : Ekonomi & Bisnis UB Malang

Bahwa artikel jurnal tersebut dibuat sebagai persyaratan *Ujian Skripsi* yang dipertahankan di depan *Dewan Penguji* pada tanggal 27 JANUARI 2015

Malang, 20 JANUARI 2015

Dosen Pembimbing,

(BAYU ILHAM PRADANA, SE., MM)

NIP. 860624 02 1 1 0122

Peran Bank Jateng Dalam Implementasi Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Cheviene Charisma Putrie
Universitas Brawijaya Malang
chevienecp@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini diaksanakan di PT. Bank Pembangunan Jawa Tengah. Tujuan pemelitian ini dilakukan untuk menjelaskan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai strategi untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian dan menjelaskan peran Bank Jateng dalam mengimplementasikan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Analisis yang digunakan dalam menjelaskan peran Bank Jateng dalam mengimplementasikan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) adalah model manajemen strategi Wheelen dan Hunger yang berfokus pada bagian implementasi strategi terdiri dari program, anggaran dan prosedur. Hasil analisis adalah Bank Jateng sebagai bank pelaksana KKP-E di Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai *intermediary* (penghubung) antara pemerintah, pihak yang menawarkan bantuan dana, dengan masyarakat, yang membutuhkan dana. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) merupakan salah satu upaya pemerintah yang bekerjasama dengan perbankan, dalam bentuk kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan untuk para pelaku usaha di sektor pertanian, dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, dan diberikan.

Kata kunci: Program, Prosedur, Anggaran, KKP-E

A. PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, pemerintah memfokuskan program pembangunannya dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan untuk peningkatan perekonomian. Hal ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, yaitu pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan (*growth with equity*). Upaya ini diwujudkan dengan menerapkan empat jalur strategi pembangunan, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan), *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-job* (kesempatan kerja) dan *pro-environment* (pelestarian lingkungan hidup), yang dilaksanakan

secara terintegrasi dan saling bersinergi secara seimbang dan konsisten dengan melibatkan masyarakat serta mengedepankan aspek pemerataan.[1]

Indonesia sebagai negara agraris, dengan luas areal tanah pertanian yang begitu dominan, maka strategi pembangunan ekonomi pada sektor pertanian dan industri pertanian harus menjadi lokomotif pembangunan. Untuk mendukung sektor pertanian, pemerintah berupaya memberikan bantuan modal dana murah dengan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian, yaitu program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Peran perbankan sangat diperlukan untuk pengimplementasian program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan Indonesia yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut Bank Jateng, merupakan salah satu bank pembangunan daerah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memajukan sektor pertanian di daerah Jawa Tengah melalui program KKP-E. Implementasi program KKP-E, sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian, perlu dianalisis agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan dan tepat sasaran sesuai tujuan dari program tersebut. Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai implementasi KKP-E di Bank Jateng dengan judul PERAN BANK JATENG DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai strategi untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian?
2. Bagaimana implementasi program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) oleh Bank Jateng?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai strategi untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian, dan menjelaskan peran Bank Jateng mengimplementasikan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E).

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Implementasi Strategi

Menurut Wheelen dan Hunger (2003:9), implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis, walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi disusun, implementasi merupakan kunci sukses

[1] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014*, hal.24

manajemen strategi. Untuk memulai proses implementasi, manajer strategi harus memperhatikan tiga hal berikut:

1) Siapa yang akan melaksanakan rencana strategi yang telah disusun?

Pelaksana strategi adalah setiap orang dalam organisasi. Para direktur fungsional atau direktur divisi (SBU), akan bekerja sama dengan para bawahan mereka untuk dapat mengimplementasikan seluruh rencana yang telah dibuat dalam skala besar. Sedangkan para manajer pabrik, manajer proyek dan kepala-kepala unit akan mengimplemenasikan rencana tersebut dengan lebih khusus, terinci, dan dalam skala lebih kecil menurut pabrik, departemen atau unit yang dipimpinnya.

2) Apa yang harus dilakukan?

Untuk dapat mendukung implementasi strategi yang telah disusun, para manajer divisi dan wilayah fungsional harus bekerja sama dengan rekan manajer lainnya dalam mengembangkan program, anggaran dan prosedur yang diperlukan.

3) Bagaimana strategi diimplementasikan?

Program, anggaran dan prosedur hanyalah bentuk rencana yang disusun lebih mendetail yang pada akhirnya membawa pada implementasi strategi yang telah dibuat.

2. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) adalah kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan kepada petani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan, kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati. Tujuan KKP-E adalah menyediakan kredit investasi atau modal kerja dengan suku bunga terjangakau bagi para petani, mengoptimalkan pemanfaatan dana kredit yang disediakan oleh perbankan untuk petani yang memerlukan pembiayaan usahanya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna peningkatan produksi sekaligus peningkatan pendapatan dan kesejahteraanya, dan mendukung peningkatan ketahanan pangan nasional dan ketahanan energi lain melalui pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial dengan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari persepektif seseorang, organisasi, orientasi industri, atau lainnya. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, terkait dengan pengimplementasian KKP-E. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan berupa literatur dari buku, penelitian terdahulu, data arsip dan data resmi lainnya yang diterbitkan oleh Bank Jateng, serta *browsing* dari internet.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, staf Seksi Legal dan Administrasi Kredit dan staf analisis Kredit di Bank Jateng Kantor Cabang Kudus. Alasan penulis memilih informan tersebut adalah pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dalam pengimplementasian KKP-E di Bank Jateng. Semua data-data tersebut lalu dianalisis dengan menggunakan metode *descriptive analysis*, yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis dengan model manajemen strategi menurut Wheelen dan Hunger yang berfokus pada bagian implementasi strategi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut kemudian membahas peran Bank Jateng dalam pengimplementasian program KKP-E, sehingga disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Jateng merupakan salah satu bank pembangunan daerah (BPD) yang sebagai bank pelaksana KKP-E di Provinsi Jawa Tengah. Yang dimaksud bank pelaksana KKP-E adalah bank umum yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyediakan dana, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E, sehingga Bank Jateng memiliki peran penting dalam pelaksanaan KKP-E di Jawa Tengah. Bank Jateng menggolongkan KKP-E sebagai kredit modal kerja untuk pembiayaan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, pengadaan pangan dan pengadaan atau peremajaan mesin pertanian (alsintan), dengan jangka waktu yang didasarkan pada siklus tanam atau siklus usaha dan analisis *cash flow* usaha yang bersangkutan dengan batasan maksimal 5 (lima) tahun.

Sumber dana KKP-E disediakan oleh Bank Jateng sehingga risiko kredit ditanggung sepenuhnya oleh Bank Jateng. Pemerintah berperan untuk menyediakan subsidi suku bunga yang diberikan kepada Bank Jateng setiap 3 bulan, melalui Departemen Keuangan kepada Bank Jateng selama jangka waktu pinjaman dari bank kepada debitur. Tingkat bunga KKP-E paling tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah suku bunga LPS + 6% untuk KKP-E non tebu, dan suku bunga LPS + 5% untuk KKP-E tebu. Plafon KKP-E untuk per petani/ peternak/ pekebun, baik secara individual atau melalui kelompok tani/koperasi, maksimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk koperasi dan kelompok tani dalam rangka pengadaan pangan dan pengadaan/peremajaan alat dan mesin (alsintan) maksimal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Proses penyaluran terdiri dari pengajuan permohonan KKP-E, pencairan dan pengembalian KKP-E. Dalam pengajuan permohonan KKP-E ke Bank Jateng dapat dilaksanakan secara non kemitraan dan kemitraan sebagai berikut:

1) Mandiri (non kemitraan) secara individu oleh petani/ peternak/ pekebun/ kelompok tani atau melalui kelompok tani/ koperasi.
2) Dengan pola kemitraan, petani/ peternak/ pekebun atau kelompok tani/ koperasi bekerjasama dengan mitra usaha.

Permohonan KKP-E yang dilakukan secara mandiri oleh petani secara individu harus menyusun Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) dan bagi kelompok tani menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Rencana Kebutuhan Usaha (RKU) petani dan atau RDKK kelompok tani yang sudah disahkan oleh Dinas Teknis disertai dengan persyaratan lainnya dapat diajukan langsung ke

Bank Jateng. Bank Jateng meneliti kelengkapan dokumen usulan kredit yang dianalisis dengan pedoman 5C (*character, capital, collateral, caondition, capacity*).

Debitur yang memenuhi syarat selanjutnya menandatangani Surat Perjanjian Kredit. Pencairan kredit dilaksanakan sesuai jadwal pencairan kredit dan dilakukan secara bertahap melalui rekening simpanan atau tabungan petani/ peternak/ nelayan yang bersangkutan. Pengembalian kredit secara individu, maka petani/ peternak/ nelayan harus mengembalikan langsung ke Bank Jateng. Apabila melalui kelompok tani/ koperasi maka pengembalian kredit ke Bank Jateng merupakan tanggung jawab pengurus kelompok/ koperasi.

Selain sebagai penyedia dan penyalur KKP-E, Bank Jateng (pusat) juga berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian selambat-lambatnya tanggal 25 bulan berikutnya secara rutin. Kantor Cabang Bank Jateng wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan penyaluran dan pengembalian KKP-E yang dikelolanya kepada Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) setempat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Dinas Teknis (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan) menyampaikan laporan penyaluran dan pengembalian KKP-E kepada Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Upaya pemerintah untuk mengatasi keterbatasan modal di sektor pertanian adalah bekerja sama dengan perbankan mengeluarkan kebijakan kredit di sektor pertanian, yaitu program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), kredit investasi dan atau modal kerja yang diberikan untuk petani, peternak, nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok (tani, peternak, nelayan dan pembudidaya ikan) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, yang sekaligus dapat dijadikan bahan baku bahan bakar nabati (*biofuel*).

Bank Jateng berperan sebagai mitra pemerintah, yaitu membantu pemerintah dalam menyediakan dana, menyalurkan dan menatausahakan program Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Dalam menyalurkan KKP-E, Bank Jateng merupakan alat kebijakan moneter pemerintah yang bertugas mengedarkan uang dalam bentuk pemberian pinjaman (KKP-E) dan menarik uang pada saat pelunasan kredit, sekaligus sebagai *intermediary*, yaitu sebagai penghubung antara masyarakat yang memerlukan dana (petani, peternak dan nelayan) dengan pihak yang menawarkan dana (pemerintah).

2. Saran

Berdasarkan analisa dan kesimpulan, maka beberapa hal yang dapat disarankan oleh penulis antara lain:

1. Menambah penyuluhan lebih lanjut mengenai KKP-E oleh pemerintah melalui PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) kepada masyarakat, khususnya para petani/ peternak/ pekebun/ nelayan dan atau kelompok tani/ koperasi, agar lebih memahami program KKP-E yang membiayai di sektor pertanian sehingga KKP-E lebih tepat sasaran dan dapat membantu meningkatkan perekonomian yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
2. Dilihat dari lapangan, pelaksanaan KKP-E saat ini sebagaian besar hanya membiayai pada sub sektor program ketahanan pangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mensosialisasikan program-program energi (bahan bakar) ramah lingkungan seperti *biofuel* dan *bioetanol*.
3. Pemerintah berkoordinasi dengan perbankan untuk terus mengkaji ulang Skim KKP-E, agar KKP-E dapat terus bermanfaat untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

Darmawanto. 2008. 'Pengembangan Kredit Sektor Pertanian (Tinjauan Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)', Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

David, Fred R. 2010. *Manajemen Strategis Konsep*, edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian. 2014. *Pedoman Teknis Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)*. Direktorat Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian

Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara: Jakarta.

Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2014*.

Robinson, Pearce. 2007. *Manajemen Strategis: Formulasi, Implementasi dan Pengendalian*, Edisi 10 Buku 1. Salemba Empat: Jakarta.

Wheelen, Thomas L. & Hunger, J. David. 2003. *Manajemen Strategis*. Andi: Yogyakarta.